

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari analisis dan pembahasan diatas adalah :

1. Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah di KPPN Blitar dimulai sejak Juli 2019. Meskipun isu-isu penggunaan KKP sudah ada sejak 2018. Di KPPN Blitar sampai dengan Desember 2019 sudah ada 30 satker yang sudah PKS dan masih 10 diantaranya sudah aktif menggunakan KKP. Besaran proporsinya pun ada yang 60%+40% dan ada juga yang 80%+20%.
2. Peran KKP dalam meminimalisir kas mengganggu bendahara pengeluaran pada satker mitra kerja KPPN Blitar adalah mengurangi jumlah kas pada rekening bendahara sarker sejumlah 40% atau porsi KKPnya. Dan menunjukkan hasil yang baik, dimana terdapat selisih yang cukup signifikan antara jumlah kas mengganggu apabila tidak menggunakan KKP dengan jumlah kas mengganggu ketika sudah menggunakan KKP. Hal ini berarti kebijakan KKP sudah mencapai hasil dari salah satu tujuannya yaitu meminimalisir kas mengganggu bendahara pengeluaran.
3. Efektivitas KKP dalam meminimalisir kas mengganggu bendahara pengeluaran satker mitra kerja KPPN Blitar tergolong sudah efektif. Dimana kriteria dari sebuah keefektivitasan suatu kegiatan, kebijakan, maupun program adalah dilihat dari pencapaian atau hasil dari program tersebut. Dan

pada pelaksanaannya penerapan KKP pada satker mitra kerja KPPN Blitar menunjukkan hasil berkurangnya tingkat kas menganggur karena menggunakan KKP. Meskipun terdapat kendala dalam penggunaan KKP misalnya terbatasnya toko yang menyediakan mesin EDC yang sesuai dengan KKP yang dimiliki.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

### **1. KPPN Blitar**

Dengan berdasarkan hasil temuan dan analisis data yang menunjukkan keefektifan penggunaan KKP di KPPN Blitar, hendaknya KPPN dapat lebih memotivasi para satker mitra kerjanya untuk dapat menggunakan KKP secara maksimal. Apabila pada 10 satker yang menggunakan KKP dapat meminimalisir kas menganggur sejumlah Rp274,495,156,- apalagi jika semua satker menggunakan KKP, maka upaya meminimalisir adanya kas menganggur dan pengelolaan keuangan lebih baik dapat lebih maksimal. Terutama terkait realisasi UP yang mayoritas satker di awal tahun anggaran sangat minim dan rata-rata kas menganggur lebih besar di awal tahun anggaran, maka KKP adalah solusi dari permasalahan tersebut. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi terkait pemanfaatan marketplace untuk menghindari biaya tambahan atas transaksi menggunakan KKP ini.

## 2. Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk kegiatan pembelajaran di IAIN Tulungagung khususnya terkait Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik. Selain itu juga dapat dijadikan acuan dan referensi bagi mahasiswa IAIN Tulungagung selanjutnya untuk penelitian yang serupa.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, sehingga untuk peneliti selanjutnya sebisa mungkin dapat melakukan penelitian yang serupa guna memperdalam pembahasan dan mendapatkan hasil pembahasan yang lebih meluas. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian kuantitatif yang membahas terkait KKP, yaitu dengan menambah variabel Indikator Kinerja Pengguna Anggaran kaitannya dengan realisasi UP, UP KKP, dan kas menganggur.